

WILDA : 3.0000

Katalog BPS : 2205.35

LABEL SEMENTARA
SENSUS BARANG 2004

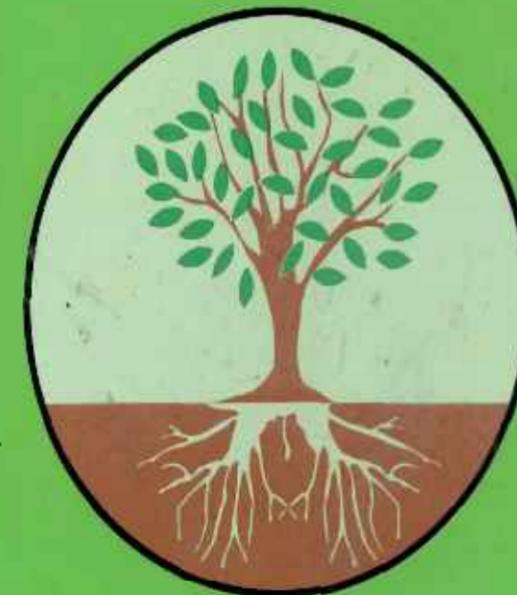
Ruang	ID	Lokasi	Pertugas
B2106	123.0611.29571	M093	MPS

Laporan Eksekutif

LINGKUNGAN HIDUP

DI PROVINSI JAWA TIMUR

HASIL PODES 2008



BD
36
350000
33
LIN
BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 43 - 44 Surabaya
Telp. (031) 8439343 (Hunting)
Fax. (031) 8494007, 8471143 E-mail : bps3500@mailhost.bps.go.id



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

		PERPUSTAKAAN	
		BADAN PUSAT STATISTIK	
KOEFISIEN		15.0909.2427	
		77664	
		EKSEMPLAR	1 DARI
		PETUGAS	

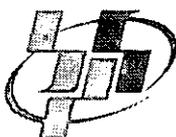
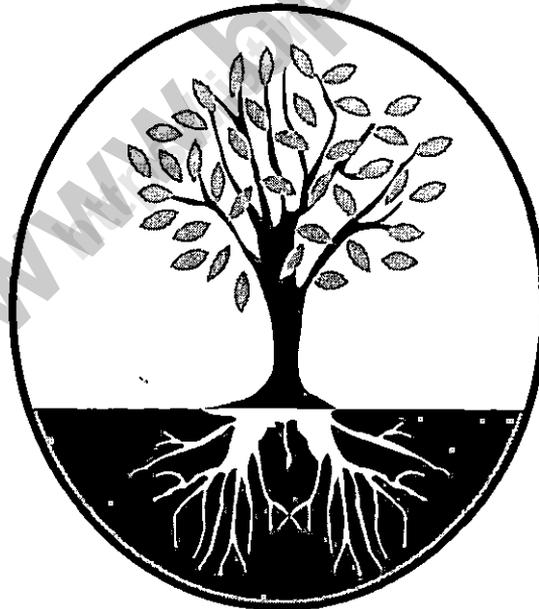
www.bps.go.id

Laporan Eksekutif

LINGKUNGAN HIDUP

DI PROVINSI JAWA TIMUR

HASIL PODES 2008



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

Laporan Eksekutif

LINGKUNGAN HIDUP

DI PROVINSI JAWA TIMUR

HASIL PODES

Nomor Publikasi : 35523.0804

Katalog BPS : 2205.35

Naskah :

Seksi Statistik Ketahanan Sosial

Editor :

Hera Hendra Permana, MA

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

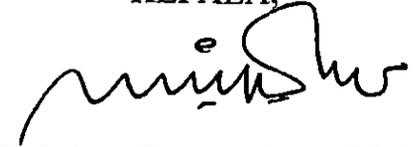
Laporan Eksekutif Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Provinsi Jawa Timur ini, merupakan laporan ringkas hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2008 yang secara spesifik menyajikan statistik lingkungan hidup. Sajian ini mengetengahkan kondisi tempat pembuangan sampah, tempat buang air besar, saluran pembuangan limbah, lokasi pemukiman kumuh, gangguan pencemaran serta bencana alam di berbagai desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur.

Laporan Eksekutif ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna data secara cepat dan mudah. Pada sisi lainnya informasi tersebut akan mempermudah para pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun legislatif untuk melakukan perencanaan dan monitoring.

Bagi para pengguna data yang memerlukan data rinci, hasil Podes 2008 juga diterbitkan dalam bentuk publikasi yang berjudul "**Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur 2008**". Publikasi yang dimaksud memuat secara lengkap karakteristik desa di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil Podes 2008, dirinci menurut Kabupaten/Kota.

Semoga penerbitan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, April 2009
BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA,



R. Lukito Praptoprijoko, M.A
NIP. 340005028

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	2
1.3 Metodologi.....	2
1.4 Sumber Data	2
2 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	
2.1 Kawasan Bantaran Sungai	4
2.2 Kawasan Di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Ekstra Tinggi....	5
2.3 Permukiman Kumuh	6
3 PERILAKU MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN	
3.1 Tempat Membuang Sampah	7
3.2 Tempat Buang Air Besar	9
3.3 Sumber Air Minum	10
4 INDUSTRI - PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN	
4.1 Industri Kecil	13
4.2 Pertambangan/Penggalian Golongan C.....	14
5 PENCEMARAN, WABAH PENYAKIT DAN BENCANA ALAM	
4.1 Pencemaran Lingkungan	15
4.2 Wabah Penyakit	16
4.3 Bencana Alam	17
6 PENUTUP	19



PENDAHULUAN

Seiring dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan, maka kegiatan pembangunan di daerah perlu didukung dengan ketersediaan data kewilayahan, khususnya data yang berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu wilayah.

Informasi kondisi lingkungan suatu wilayah akan memberikan input awal bagi perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Kondisi ini akan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

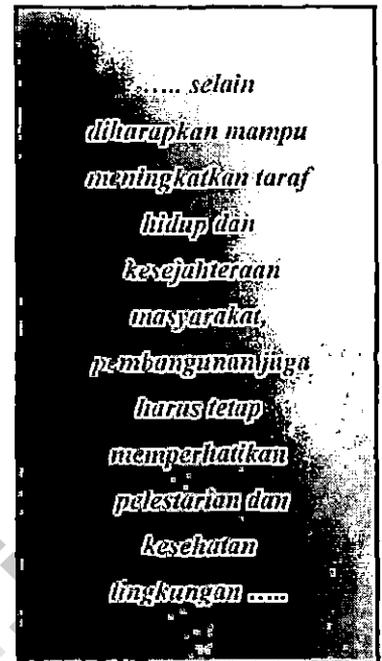
1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada bidang sosial maupun ekonomi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain pembangunan juga memberikan efek negatif yaitu permasalahan lingkungan. Oleh sebab itu orientasi pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan tuntutan yang tidak terelakkan lagi.

Permasalahan lingkungan, khususnya di Jawa Timur telah menjadi permasalahan yang cukup kompleks, dan memerlukan perhatian yang cukup serius. Problematika lingkungan akan melibatkan berbagai lini/sektor, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan kerjasama yang baik antara semua pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini lebih terarah pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena peningkatan taraf hidup

dan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari pembangunan yang tetap memperhatikan pelestarian dan kesehatan lingkungan sekitarnya tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Cerminan hasil pembangunan yang berorientasi pada Sustainable Development dapat dilihat dari kualitas lingkungan wilayahnya. Pengukuran tingkat keberhasilan itu perlu dilakukan sampai dengan wilayah administrasi terendah yaitu desa/ kelurahan. Oleh karena itu keberadaan data Potensi Desa dapat memberikan gambaran umum mengenai kualitas lingkungan.



1.2. Tujuan

Laporan eksekutif ini disusun agar dapat memberikan gambaran umum mengenai kondisi lingkungan hidup wilayah desa di provinsi Jawa Timur pada tahun 2008 secara sederhana dan mudah bagi pengguna data.

1.3. Metodologi

Dalam penulisan laporan ini metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dimana data yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik diuraikan secara singkat disertai gambaran mengenai keadaan yang ada, sehingga dapat lebih jelas dan mudah dicerna.

1.4. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan bersumber dari data Potensi Desa Tahun 2008. Data disajikan dalam bentuk tabulasi silang maupun grafik.



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Perkembangan pembangunan perumahan sebagai tempat hunian selalu berkorelasi erat dengan kemajuan pembangunan. Makin tinggi keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicapai tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga. Peningkatan ini akan berkorelasi dengan kualitas rumah yang didiami.

Sejalan dengan bertambahnya penduduk, semakin banyak pula rumah hunian yang harus dibangun. Pada ujungnya, akan semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk perumahan. Namun di sisi lain, lahan yang tersedia sangat terbatas. Hal ini lebih dirasakan di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduknya. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang simultan guna penataan suatu wilayah, khususnya penataan daerah permukiman agar nantinya masyarakat dapat tinggal dengan aman dan nyaman.

Program pembangunan tidak sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegagalan mewujudkan tingkat kesejahteraan hidup yang layak dan merata telah menyebabkan sebagian masyarakat harus bertempat tinggal di permukiman kumuh atau di lokasi bukan peruntukan rumah tinggal seperti di bantaran sungai dan di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Kondisi ini dapat pula terjadi karena ketidakpedulian atau ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah daerah akan dampak lingkungan dari penggunaan daerah berisiko tersebut.

Beberapa kawasan yang disebutkan di atas seringkali dijadikan sebagai daerah permukiman penduduk walaupun sebenarnya kurang layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Selain kurang memenuhi syarat kesehatan, untuk kawasan tertentu juga relatif berbahaya bagi keselamatan misalkan bantaran sungai. Oleh karena itu, sudah selayaknya kawasan tersebut tidak dipergunakan sebagai daerah permukiman penduduk.

2.1. Kawasan Bantaran Sungai

Bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai). Bantaran sungai sebenarnya merupakan area yang disediakan guna menampung air sungai bila sewaktu-waktu terjadi penambahan debit air. Jadi sangat membahayakan apabila kawasan tersebut digunakan sebagai tempat tinggal.

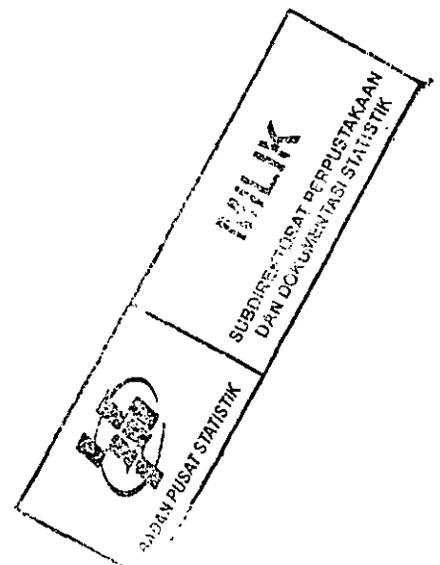
Dari 8.505 desa yang ada di Jawa Timur, bersumber data Podes 2008 sekitar 20,33 persen diantaranya memiliki permukiman di kawasan bantaran sungai. Sedangkan sebanyak 59,87 persen tidak mempunyai kawasan permukiman di bantaran sungai, dan sisanya sebanyak 19,80 persen tidak ada sungai yang melintas di wilayah desa tersebut. Ini tentunya perlu mendapat perhatian, mengingat karena kawasan bantaran sungai rawan terjadi bencana banjir. Disamping itu diduga masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai lebih rentan terhadap wabah penyakit.



Tabel 1.1

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Bantaran Sungai

Kabupaten/Kota	Banyak desa/kelurahan yang memiliki Permukiman di Bantaran Sungai	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Malang	40	70,18
Kota Pasuruan	19	55,88
Kota Mojokerto	9	50,00
Kota Blitar	10	47,62
Kab. Pamekasan	88	46,56



Dari data tersebut diketahui pula bahwa Kota Malang merupakan Kabupaten/Kota yang secara relatif terbanyak mempunyai desa dengan permukiman di kawasan bantaran sungai. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hanya satu daerah yang tidak mempunyai permukiman penduduk di kawasan bantaran sungai yakni Kota Probolinggo.

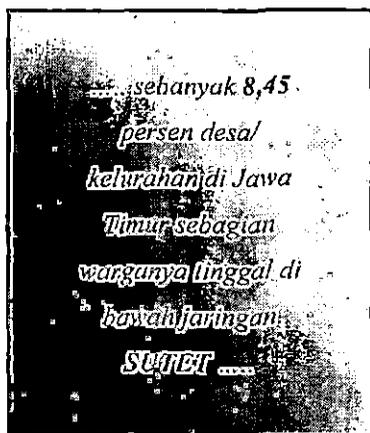
2.2. Kawasan Di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Ekstra Tinggi

Jaringan listrik tegangan tinggi lazim dikenal orang dengan sebutan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) biasa dialiri tegangan listrik di atas 500 KV. Warga masyarakat terkadang menjadikan kawasan di bawah jaringan tersebut sebagai tempat tinggal, walaupun sebenarnya kurang layak.

Tabel 1.2
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Bawah SUTET

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang mempunyai Permukiman di Bawah SUTET	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab. Probolinggo	79	23,94
Kab. Pasuruan	86	23,56
Kota Kediri	9	19,57
Kota Malang	11	19,3
Kota Batu	4	16,67

Sebagian besar desa-desa di Jawa Timur memang tidak dilewati oleh SUTET. Namun sebanyak 8,45 persen desa di Jawa Timur ternyata ada sebagian warganya yang tinggal di bawah jaringan SUTET. Kota Pasuruan merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur dimana tidak ada penduduknya yang tinggal di kawasan tersebut.



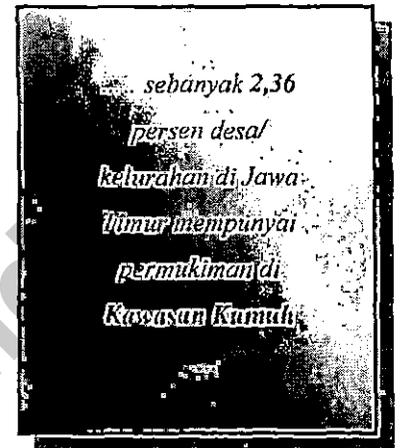
2.3. Permukiman Kumuh

Daerah perkotaan yang tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih tinggi, menuntut sebagian masyarakat untuk tinggal berhimpitan di suatu lokasi. Tingkat kepadatan yang tinggi tersebut masih ditambah lagi dengan kualitas rumah yang dapat dikatakan tidak layak huni dan saluran pembuangan limbah yang seringkali macet, menjadikan suatu lingkungan permukiman menjadi kumuh serta jauh dari ideal untuk dijadikan tempat tinggal.

Tabel 1.3
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Kumuh

Kabupaten/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mempunyai Permukiman di Kawasan Kumuh	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Malang	19	33,33
Kota Madiun	9	33,33
Kota Surabaya	48	29,45
Kota Kediri	7	15,22
Kota Blitar	2	9,52

Kota Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, pusat pemerintahan dan pusat segala aktivitas masyarakat Jawa Timur, yang didukung berbagai sarana & prasarana, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila Kota Surabaya menempati urutan teratas secara absolut terbanyak permukiman di kawasan kumuhnya. Sekitar 29,45 persen kelurahan di Kota Surabaya memiliki permukiman kumuh. Tentunya ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri bagi pemerintah, khususnya pihak Pemerintah Kota Surabaya.





PERILAKU MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Permasalahan bagi lingkungan pada suatu wilayah tidak hanya kepadatan penduduk saja. Selain itu masih banyak permasalahan lain, seperti penyediaan struktur dan infra struktur bagi masyarakat, hingga masalah pengelolaan lingkungan yang tidak bisa lepas dari perilaku masyarakatnya itu sendiri.

Beberapa perilaku masyarakat ditengarai menjadi pemicu perubahan kualitas lingkungan suatu wilayah. Perilaku tersebut antara lain tercermin dari tempat membuang sampah, tempat buang air besar dan sumber air minum yang digunakan. Kebiasaan atau cara pembuangan sampah dan kotoran/tinja rumah tangga tersebut sangat erat kaitannya dengan kesehatan rumah tangga, karena sampah dan kotoran merupakan media terjadinya resiko penularan penyakit. Dengan adanya kesadaran dari masyarakat yang diwujudkan dalam perilakunya sehari-hari, diharapkan kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur dapat terus terjaga.

3.1. Tempat Membuang Sampah

Sampah rumah tangga apabila tidak ditangani secara serius, semakin lama akan menimbulkan permasalahan yang serius pula. Sampah selayaknya dibuang dalam kotak sampah untuk kemudian diangkut dan selanjutnya diproses atau didaur ulang. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di sungai atau tempat lainnya. Selain tidak baik ditinjau dari sisi kesehatan, hal ini juga dapat menimbulkan bahaya misalnya banjir.

Berdasarkan data Podes 2008 diketahui bahwa baru 9,86 persen desa di Jawa Timur yang sebagian besar masyarakatnya membuang sampah di tempat sampah untuk

kemudian diangkut. Sebagian besar desa di Jawa Timur penduduknya cenderung membuang sampah dalam lubang/dibakar, dimana tercatat sebanyak 79,20 persen desa yang penduduknya berperilaku seperti itu. Sedangkan yang membuang di sungai dan tempat lainnya masih relatif kecil. Secara visual dapat dilihat pada grafik 1.1.



Kota Surabaya menempati urutan teratas persentase desa sadar sampah di Jawa Timur. Penduduk Kota Surabaya sebagian besar telah membuang sampah di tempat sampah untuk kemudian diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA). Pengelolaan sampah di Kota Surabaya yang cukup baik tersebut kiranya patut dicontoh oleh Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

..... sekitar 79,20
persen desa/
kelurahan di Jawa
Timur mayoritas
penduduknya
membuang sampah
pada lubang/dibakar

Tabel 2.1
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa/kelurahan yang sadar sampah

Kabupaten/Kota	Banyak desa/kelurahan yang sadar sampah	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Surabaya	152	93,25
Kota Malang	53	92,98
Kota Mojokerto	15	83,33
Kota Pasuruan	28	82,35
Kota Madiun	20	74,07

Untuk lebih meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat perlu adanya panduan, khususnya untuk pengelolaan sampah yang ada di sekitar rumah dan lingkungan perumahan,

yang tentunya berdampak langsung pada kondisi kesehatan masyarakat.

3.2. Tempat Buang Air Besar

Salah satu perilaku masyarakat yang dapat dijadikan sebagai indikator kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan adalah kepemilikan fasilitas tempat buang air besar. Peningkatan persentase masyarakat yang telah mempunyai jamban pribadi mengindikasikan adanya peningkatan kepedulian masyarakat akan kesehatan lingkungannya.

Di Jawa Timur dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kepedulian masyarakat tersebut. Ini tercermin dari peningkatan jumlah desa yang sebagian besar masyarakatnya telah menggunakan jamban pribadi. Hasil Podes 2000 mencatat sebanyak 4.040 desa yang masuk kategori tersebut. Kemudian meningkat secara berturut-turut menjadi 4.638 desa berdasarkan Podes 2003 dan 4.970 desa dari hasil Podes 2005. Berdasarkan Podes 2008 diketahui bahwa jumlah desa yang sebagian besar warganya memiliki jamban pribadi telah mencapai 5.937 desa.



...sekitar 25,46 persen desa/kelurahan di Jawa Timur sebagian besar penduduknya menggunakan selain jamban untuk tempat BAB

Apabila dilihat persentasenya, desa-desa di Jawa Timur yang sebagian besar warganya telah memiliki jamban sendiri mencapai 69,81 persen. Namun yang masih cukup memprihatinkan adalah masih cukup besarnya persentase desa yang sebagian besar penduduknya menggunakan selain jamban untuk tempat buang air besar, yakni sebesar 25,46 persen. Tiga daerah di Jawa Timur yakni Kota Blitar, Kota Mojokerto dan

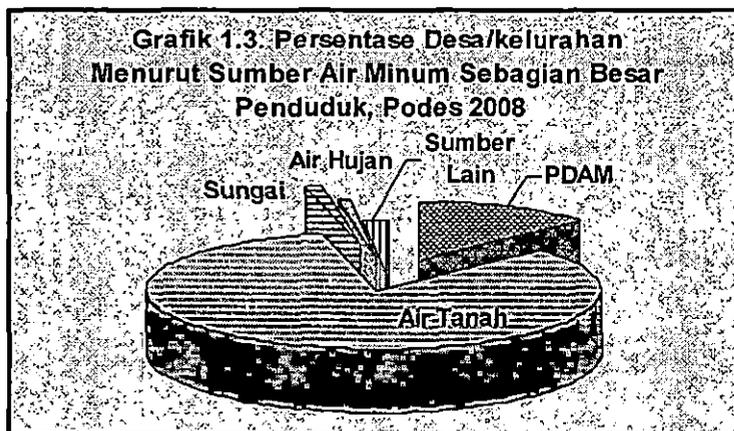
Kota Madiun, tercatat sebagai daerah yang seluruh desanya mayoritas penduduknya memiliki jamban pribadi.

Tabel 2.2
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan
persentase desa/kelurahan yang mayoritas penduduknya
memiliki jamban sendiri

Kabupaten/Kota	Banyak desa/kelurahan yang mayoritas penduduknya memiliki jamban sendiri	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Keluraha n
(1)	(2)	(3)
Kota Blitar	21	100
Kota Mojokerto	18	100
Kota Madiun	27	100
Kota Surabaya	162	99,39
Kota Malang	56	98,25

3.3. Sumber Air Minum

Perilaku penduduk dalam penggunaan sumber air minum sedikit banyak juga berpengaruh terhadap lingkungan. Penggunaan sumber air minum yang berasal dari air tanah, tentunya berdampak pada persediaan air tanah itu sendiri. Semakin menipisnya tingkat persediaan air tanah akan berakibat semakin menurunnya permukaan air tanah, yang tentunya berujung pada terjadinya intrusi air laut yang masuk ke daratan. Sumber air minum yang dicakup disini adalah sumber air untuk keperluan minum dan memasak sebagian besar penduduk.



desa/kelurahan
yang mayoritas
penduduknya telah
menikmati fasilitas
PDAM baru
mencapai
12,69 persen.

Mayoritas penduduk Jawa Timur masih menjadikan air tanah sebagai pilihan utama dalam pemenuhan kebutuhan airnya. Hal tersebut tercermin dari hasil Podes 2008 yang menunjukkan sebanyak 83,40 persen desa di Jawa Timur sebagian besar masyarakatnya menggunakan air tanah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan desa yang mayoritas penduduknya telah menikmati fasilitas PDAM baru mencapai 12,69 persen saja. Sedangkan yang memanfaatkan sungai, air hujan dan sumber lainnya sebagai sumber air tidak ada yang lebih dari 2 persen.

Tabel 2.3
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan
persentase desa/kelurahan yang mayoritas
penduduknya menggunakan air tanah

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang mayoritas penduduknya menggunakan air tanah	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Blitar	21	100
Kab. Trenggalek	156	99,36
Kab. Kediri	340	98,84
Kab. Jember	242	97,98
Kab. Jombang	295	96,41

Tingginya pemanfaatan air tanah di Jawa Timur tentunya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Apabila hal ini diabaikan, dapat menimbulkan masalah yang serius di kemudian hari. Hal sama juga dapat terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Kota Blitar tercatat sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang semua desanya menggunakan air tanah sebagai sumber air.

INDUSTRI – PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu strategi pembangunan. Sektor industri dan pertambangan merupakan dua sektor yang diandalkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Keberadaan industri (besar, sedang dan kecil) maupun usaha penambangan/ penggalan golongan C sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan kegiatan usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sekitar, serta merangsang timbulnya sektor informal yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, kedua sektor tersebut juga memberikan kontribusi yang relatif besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun di sisi lain, sektor industri dan pertambangan seringkali juga disebut-sebut sebagai biang keladi terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Kedua sektor ini apabila tidak ditangani dan ditata secara serius memang rentan untuk dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan kedua sektor tersebut mempunyai potensi untuk menimbulkan perubahan kualitas lingkungan melalui limbah yang dihasilkan dalam proses produksinya. Oleh karena itu perhatian terhadap kedua sektor tersebut perlu dilakukan, agar dapat memberikan kontribusi pada pembangunan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungan melalui penataan dan pengawasan yang lebih optimal.

4.1. Industri Kecil

Industri kecil merupakan jenis industri yang paling memasyarakat dibanding dengan jenis industri yang lain. Sebab, selain memerlukan modal yang relatif sedikit, tidak memerlukan lahan yang luas, industri kecil biasanya cenderung padat karya.

Kerap kali dijumpai bahwa industri kecil tidak dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah. Walaupun limbah yang dihasilkan relatif lebih sedikit dibanding jenis industri besar dan sedang. Namun hal tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja, mengingat limbah yang dihasilkan juga dapat mencemari lingkungan sekitarnya.

Tabel 3.2

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa yang ada Industri Kecil di Wilayahnya

Kabupaten/Kota	Banyak desa/keurahan yang ada Industri Kecil di Wilayahnya	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab. Trenggalek	157	100,00
Kota Probolinggo	29	100,00
Kota Pasuruan	34	100,00
Kota Mojokerto	18	100,00
Kab. Situbondo	135	99,26

Data Podes mencatat industri kecil tersebar di 7.527 desa di Jawa Timur atau sekitar 88,50 persen dari desa yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa industri kecil di Jawa Timur keberadaannya telah merambah hampir ke semua desa. Kabupaten Trenggalek, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kabupaten Situbondo merupakan daerah-daerah yang tercatat semua desanya memiliki industri kecil di wilayahnya.

4.2. Pertambangan/Penggalian Golongan C

Penggalian Golongan C adalah kegiatan di bidang pertambangan dan penggalian, seperti batu/koral, pasir, kapur,

belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat, aspal, gips dan gamping. Tidak kalah dengan industri, keberadaan usaha pertambangan/penggalian juga kerap menimbulkan degradasi kualitas lingkungan. Hal ini dapat terjadi bila eksploitasi yang dilakukan tidak memperhatikan faktor keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitarnya.

Tabel 3.3

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa yang ada Usaha Penambangan/Penggalian di Wilayahnya

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang ada Penambangan/ Penggalian di Wilayahnya	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab. Pacitan	110	64,33
Kab. Trenggalek	97	61,78
Kab. Blitar	137	55,24
Kab. Situbondo	74	54,41
Kota Batu	13	54,17

Berdasarkan data Podes tahun 2008 dari total desa/kelurahan di Jawa Timur sebanyak 8.505, sekitar 30,36 persen di antaranya terdapat lokasi usaha penambangan/penggalian golongan C. Kabupaten Pacitan merupakan yang tertinggi persentasenya tercatat 64,33 persen atau sebanyak 110 desa/kelurahan yang mempunyai lokasi usaha penambangan/penggalian golongan C. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut juga diperlukan rehabilitasi lahan atau pengoperasian sarana pengolah limbah yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya gangguan kesehatan masyarakat sekitar akibat adanya kegiatan usaha tersebut.

.... dari total
desa/kelurahan di Jawa
Timur sebanyak 8.505,
sekitar 30,36 persen
di antaranya terdapat
lokasi usaha
penambangan/
penggalian Gol.C...

BAB
5

PENCEMARAN, WABAH PENYAKIT, DAN BENCANA ALAM

Perubahan kualitas lingkungan hidup bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi kelangsungan hidup manusia. Pencemaran, wabah penyakit dan bencana alam merupakan sebagian dampak yang dapat timbul dari terjadinya kerusakan lingkungan yang kerap dirasakan langsung akibatnya oleh masyarakat.

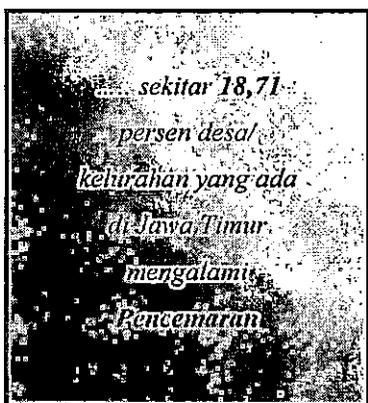
5.1. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan di suatu daerah biasa ditandai dengan adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan. Pencemaran yang terjadi dapat berupa pencemaran air, udara, tanah maupun suara.

Tabel 4.1

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa yang mengalami Pencemaran (Air/Udara/Tanah/Suara)

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang mengalami Pencemaran (Air/Udara/ Tanah/Suara)	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Pasuruan	16	47,06
Kota Kediri	20	43,48
Kota Mojokerto	7	38,89
Kab. Sidoarjo	135	38,24
Kab. Tulungagung	98	36,16



Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur tercatat sebagian desanya terjadi pencemaran lingkungan. Kota Pasuruan, Kota Kediri dan Kota Mojokerto merupakan tiga daerah yang tertinggi persentase desanya yang mengalami pencemaran lingkungan. Apabila diperhatikan secara mendalam, ternyata hal tersebut dapat saja terjadi mengingat di ketiga daerah tersebut terdapat banyak industri, baik itu yang berskala besar, sedang maupun kecil.

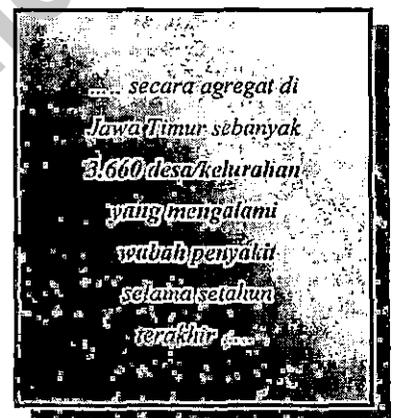
5.2. Wabah Penyakit

Wabah penyakit adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar anggota masyarakat. Jenis Wabah yang diamati secara umum adalah muntaber, demam berdarah, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), campak dan malaria.

Tabel 4.2

Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase desa yang mengalami Wabah Penyakit Periode 2007 - 2008

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang mengalami Wabah Penyakit Periode 2007 - 2008	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kota Madiun	27	100
Kota Pasuruan	27	79,41
Kab Magetan	171	72,77
Kab. Sumenep	217	65,36
Kota Kediri	30	65,22



Dari data Podes 2008 diketahui beberapa daerah di Jawa Timur mengalami wabah penyakit selama setahun terakhir. Kota Madiun merupakan satu-satunya daerah yang semua desa/kelurahannya mengalami wabah penyakit. Secara agregat di Jawa Timur sebanyak 3.660 desa yang mengalami wabah penyakit selama setahun terakhir.

5.3. Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kerusakan, kerugian, kesengsaraan dan penderitaan penduduk. Bencana alam merupakan suatu yang tidak dapat ditolak, namun dapat diminimalkan resikonya. Beberapa bencana alam yang terjadi sebenarnya juga tidak lepas dari perilaku manusia itu sendiri. Penebangan hutan yang tidak terkendali beresiko menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa peristiwa bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Bencana Tsunami di Aceh, gempa bumi di NTT, serta angin puyuh dan banjir yang terjadi di beberapa daerah. Kejadian yang baru saja terjadi adalah bencana tanah longsor di Situ Gintung-Banten yang telah menelan korban jiwa hingga di atas 100 jiwa. Belum lagi bencana banjir yang juga dirasakan di beberapa daerah di Jawa Timur. Bahkan di Kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban dan Bojonegoro ratusan bangunan/rumah dan areal persawahan tenggelam walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Tabel 4.3
Urutan 5 besar kabupaten/kota berdasarkan persentase
desa/kelurahan yang mengalami Bencana Alam
dalam Periode 2005 - 2008

Kabupaten/Kota	Banyak desa/ kelurahan yang mengalami Bencana Alam Periode 2005 - 2008	Persentase Terhadap Jumlah Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)
Kab. Trenggalek	130	82,80
Kota Pasuruan	28	82,35
Kab. Pacitan	131	76,61
Kab. Situbondo	103	75,74
Kab. Ponorogo	176	57,7

Di Jawa Timur sendiri selama periode 2005 – 2008 tercatat sebanyak 2.970 desa/kelurahan yang mengalami bencana alam, baik itu berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin

puyuh ataupun yang lain. Kabupaten Trenggalek merupakan yang terbesar persentase desanya yang mengalami bencana alam selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 130 desa/kelurahan (82,80 persen dari jumlah desa/kelurahan) di sana yang mengalami bencana alam.

Mengingat bencana alam tidak dapat dihindari tetapi hanya dapat diminimalkan resikonya, maka sudah selayaknya bagi daerah-daerah yang rawan bencana untuk dapat lebih mewaspadaai terjadinya bencana alam tersebut. Untuk daerah yang tergolong rawan bencana selayaknya menyiapkan tim penanggulangan bencana yang dapat diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Sedangkan untuk daerah yang tergolong tidak rawan bencana diharapkan tidak lengah dan tetap selalu waspada, mengingat bencana dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.



PENUTUP

Berdasarkan paparan diatas dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan hidup di Jawa Timur masih cukup baik. Namun demikian beberapa hal masih perlu dilakukan guna mempertahankan kondisi yang sudah baik tersebut. Berbagai usaha yang dilakukan tersebut hendaknya dapat melibatkan semua pihak, baik itu pemerintah melalui instansi terkait maupun masyarakat.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian khususnya pemerintah Propinsi Jawa Timur antara lain :

1. Masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan marginal, khususnya daerah bantaran sungai, di bawah jaringan listrik tegangan ekstra tinggi (SUTET) dan kawasan kumuh. Oleh karena itu diperlukan upaya guna menjaga keseimbangan dan merehabilitasi berbagai dampak aktivitas sosial yang ada melalui penataan lingkungan.
2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam perilakunya sehari-hari, khususnya perilaku membuang sampah dan penggunaan jamban pribadi.
3. Pemakaian air tanah di Jawa Timur perlu mendapat perhatian lebih, mengingat kecenderungan pemakaian air tanah semakin meningkat.
4. Cukup besarnya jumlah industri kecil dan usaha penambangan/penggalian golongan C yang beraktifitas di Jawa Timur. Untuk itu diperlukan penataan dan pengawasan yang lebih optimal, sehingga dapat

memberikan kontribusi pada pembangunan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungan.

5. Diperlukan penanganan yang lebih efektif dan komprehensif bagi daerah yang mengalami bencana alam, serta lebih mewaspadaai terjadinya bencana bagi daerah yang tergolong rawan bencana.

www.bps.go.id